

TAJUK RENCANA

Tak Ada Lagi Penjurusan di SMA

SEMUA siswa SMA Negeri di DIY, sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka belajar pada tahun ajaran 2024/2025 (KR 19/7). Maka kini tidak ada lagi pembagian jurusan IPA, IPS dan bahasa. Artinya kini siswa bebas memilih mata Pelajaran sesuai bakat dan minat mereka.

Kurikulum tersebut memungkinkan siswa untuk lebih konsentrasi pada minat dan aspirasi belajar mereka. Hal ini tentu berdampak pada kesesuaian di perguruan tinggi (PT) yang diinginkan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Dr Didik Wardaya, maka misal seorang siswa sejak awal ingin masuk Fakultas Kedokteran maka siswa akan lebih konsentrasi pada pelajaran biologi dan kimia, dan seterusnya.

Kurikulum Merdeka Belajar memberikan siswa kebebasan untuk menentukan jalur pendidikan dan mengembangkan kreativitas mereka melalui kegiatan yang lebih bervariasi dan menantang.

Dengan memberikan pilihan mata pelajaran, kurikulum ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka dapat memilih bidang yang mereka sukai.

Kurikulum ini diiringi dengan platform edukasi seperti Merdeka Mengajar, yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan meningkatkan kompetensi mereka.

Namun demikian, ada beberapa catatan kekurangannya karena kurikulum ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan ketersediaan sumber daya, sehingga siswa yang memilih mata pelajaran yang kurang mendapatkan dukungan sumber daya dapat mengalami kesulitan. Maka perlu pemerataan sumberdaya di setiap sekolah.

Dengan diresmikannya baru pihak pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kurikulum baru ini dan melakukan persiapan yang matang. Selain itu guru sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga harus diberikan pola pendidikan dan latihan (diklat) secara bertahap namun berkelanjutan. Memperkenalkan strategi-strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid, me-

tingkatkan kualitas pedagogis guru, serta mengubah pola pikir dan paradigma lama guru. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik.

Manajemen waktu siswa seringkali belum matang, sehingga pilihan bebas dalam kurikulum ini dapat mengakibatkan waktu yang tidak seimbang untuk setiap mata pelajaran.

Kurikulum Merdeka Belajar memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan fleksibilitas dan kreativitas. Namun, perlu perhatian lebih dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul, seperti ketidakjelasan pemahaman materi dan tidak meratanya ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, kurikulum ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia.

Dalam sejumlah penelitian terhadap pemberlakuan kurikulum tersebut, antara lain menunjukkan sisi positif. Misalnya pada penelitian Sumarsih et al. (2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang sekolahnya menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar cenderung memiliki peningkatan dalam segi perilaku, seperti berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, dan mampu mengamalkan Pancasila.

Apa yang harus disiapkan menghadapinya? Guru harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi perubahan kurikulum, termasuk kemampuan sosial dan adaptasi dengan perubahan. Guru perlu dilatih dan diberi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka.

Sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat implementasi kurikulum merdeka.

Perlu adanya aturan yang jelas dan konsisten dalam implementasi kurikulum merdeka. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa semua sekolah mengikuti standar yang sama dan tidak ada kesenjangan dalam implementasi. (***)

Master Plan Ekonomi Syariah DIY Berbasis Budaya Lokal

DIY adalah provinsi istimewa. Dalam konteks ekonomi syariah, DIY pun sepatutnya istimewa, baik dalam hal target dan tujuan, pendekatan, maupun dalam hal implementasi di lapangan. Kesemuanya itu tentu butuh master plan yang istimewa. Posisi ekonomi syariah di DIY dalam skala nasional, jika acuannya adalah penghargaan Adinata Syariah, posisi DIY cukup lumayan meski belum istimewa.

DIY adalah provinsi yang unik secara ekonomi, misal provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi di Indonesia (Laki-laki selama 74,40 tahun, perempuan 77,04 tahun) tetapi kemiskinannya tinggi (10,83%) di atas rata-rata nasional (9,03%). Juga provinsi dengan indeks kebahagiaan tinggi tetapi koefisien ketimpangan juga tinggi. Tentu ini menjadi satu poin kunci terkait bagaimana arah kebijakan ekonomi syariah di DIY seharusnya diambil.

Fenomena atau sebagian ekonom menyebut anomali ekonomi tersebut muncul karena adanya faktor budaya dan ukuran ekonomi yang bersinggungan. Miskin tapi bahagia, UMR rendah tapi usia warganya panjang. Itu unik, dan tidak bisa dijelaskan dengan pendekatan ekonomi, *an sich*.

Abdul Qoyum

unggulan dan basis kebijakan. Ada dua hal pokok yang perlu difokuskan, yaitu meningkatkan status Yogyakarta sebagai destinasi Muslim friendly travel dan melengkapi wisata Yogyakarta dengan wisata religi. Muslim friendly travel tidaklah terlalu sulit dilakukan di DIY, mengingat sudah banyaknya tempat

master plan ekonomi syariah DIY harus disusun dengan konsep pendekatan keislaman dan kebudayaan sekaligus. Banyak tradisi budaya Yogyakarta yang sudah sejalan dengan nafas dan nilai ke-Islaman. Ini akan sangat efektif untuk Yogyakarta yang istimewa. Misal wisata religi tradisi Sekaten, harus diakui dalam platform ekonomi syariah, bukan hanya proses labelisasi.

DIY harus menghindari pendekatan labeling semata untuk ekonomi syariah. Labelisasi dalam konteks Yogyakarta justru akan kontraproduktif dengan ke-khasan dan keistimewaan Yogyakarta. Ekonomi syariah di DIY dituntut mampu melakukan proses pembauran dengan tradisi lokal Yogyakarta yang bernilai budaya dan ekonomi sangat tinggi. Ini justru bisa menjadi pendekatan baru, dalam ekonomi Islam yang akan diadopsi secara nasional, yakni ekonomi Islam yang mengakomodir kekhasan Budaya lokal.

Pendekatan ini saja tidak bertentangan dengan spirit Islam. Dalam Islam, adat dan kebiasaan masyarakat juga bisa diterima asalkan tidak bertentangan dengan spirit dan nilai Islam. Bahkan ajaran *mudharabah* atau *syirkah* itu juga sudah ada sejak zaman sebelum Islam datang, tetapi tetap diakui karena sesuai dengan nilai dan tujuan Islam. Ini sesuai dengan kaidah "*al-adatun muhakkamah*", yang artinya adat atau tradisi bisa dijadikan sebagai landasan hukum, tentu dengan batasan tertentu. (*)

Dr Abdul Qoyum MSc Fin, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Kalijaga / Ketua V DPW IAEI DIY.



Yogya Memang Unik

Pertama, Yogya adalah pusat pendidikan di Indonesia. Julukan Yogya sebagai kota pelajar sudah sejak lama disandang. Ada banyak kampus terbaik Indonesia di DIY, UGM, UNY, UIN, UPN, UII, UMY, UAD, UNU dll. Artinya, dalam konteks *master plan* untuk bidang pendidikan ekonomi syariah, DIY harusnya tidak memiliki kesulitan. Ada banyak sumber daya manusia potensial untuk mengembangkan ekonomi syariah. Terlebih wilayah DIY tidak terlalu luas, maka hirilisasi pendidikan ekonomi syariah sangatlah tidak sulit. Tentu saja, ini tinggal koordinasi yang baik dan yang terpenting siapa yang menjadi dirijen untuk program ini. Berbagai program pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat harusnya cukup mudah diintegrasikan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Kedua, Yogya adalah kota pariwisata. Ekonomi syariah di DIY harus menjadikan pariwisata sebagai sektor

wisata yang memenuhi unsur ini. Yang dibutuhkan adalah melengkapi aspek substansi dengan aspek formal melalui SOP yang diinisiasi oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai lembaga yang otoritatif di DIY dalam bidang ini.

Wisata religi sangat perlu dibuka, karena potensial menyumbang PAD, juga DIY juga memiliki situs-situs sejarah Islam yang bisa menjadi sektor unggulan wisata religi, seperti tradisi-tradisi Yogyakarta (Grebeg Sekaten, Grebeg Syawal dll), Makam Imogiri, Masjid Patok Negro, Makam Para Auliya Krapyak, Mlangi, dan lain-lain. Tinggal sedikit penataan, dan konsep marketing yang bagus, dalam waktu singkat, saya kira DIY bisa menjadi pusat destinasi wisata religi nasional, melengkapi sektor wisata lainnya.

Ekonomi Syariah Berbasis Budaya Lokal

DIY adalah kota budaya, dengan ajaran Islam yang mengalami akulturasi budaya yang kuat. Karena itu,

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.
Direktur Umum: Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSc.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngadul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Zuta Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyuwangi: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Kado Terakhir untuk STMM MMTc

SIKLUS perubahan selalu mengubur yang lama dan melahirkan yang baru. Fenomena itu terjadi di semua lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Sebagai kunci utama penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan cerdas institusi pendidikan tak jarang dipaksa melintasi siklus perubahan yang cepat dan sporadis. Entah karena tuntutan zaman, keputusan politik atau jalan regulasi yang harus dipatuhi.

Sejarah pendidikan Indonesia mencatat beberapa institusi pendidikan dibubarkan karena alasan tersebut. Universitas RES PUBLIKA, ditutup karena waktu itu dianggap berafiliasi dengan golongan kiri. Akademi Penebaran (AKPEN) sebuah perguruan tinggi di bawah Departemen Penebaran juga dibubarkan karena dianggap sudah tidak relevan dengan zamannya serta beberapa perguruan tinggi lain yang tutup karena dianggap melanggar regulasi.

Sekolah Tinggi Multimedia STMM MMTc, salah satu kampus unggul bidang multimedia di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyadari adanya tantangan dan terpaan perubahan yang sedang menghadang. Di usia ke 39 STMM MMTc terus berbenah dengan melakukan akselerasi di semua bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui strategi dan peta jalan baru untuk melahirkan generasi emas, MMTc terus mengembangkan misinya sesuai maklumat dan tuntutan statuta pendidikan nasional saat ini. Antara lain melalui percepatan program riset dan sertifikasi bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehingga setiap alumni MMTc dibekali dua 'senjata' sekaligus, yakni ijazah dan sertifikat kompetensi. Dengan demikian mereka siap menatap masa depan dan memasuki dunia kerja. Sebaliknya para *user* tidak meragukan profesionalisme alumni, karena standar kompetensi yang sudah dimiliki. Tanpa melihat masa depan Lembaga Pendidikan ibarat kompas kehilangan jarum penunjuk arahnya. Dia mampu berjalan, tetapi tidak paham ke mana arah tujuan yang hen-

Eko Wahyunto

dak diraih.

Wacana perubahan STMM MMTc menjadi Politeknik Digital Yogya harus disambut dengan gegap gempita dan dianggap sebagai langkah strategis, dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM bertalenta digital. Seperti diketahui, sesuai amanat PP 57 tahun 2022 pasal 3, Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian, Ketentuan ini mewajibkan seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian berubah menjadi Politeknik yang mengedepankan pendidikan vokasi. Perubahan bentuk perguruan tinggi STMM 'MMTC' menjadi Politeknik sudah diawali dengan penataan organisasi dan pembangunan infrastruktur. Selain bertujuan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perubahan ini diharapkan berdampak meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik, sehingga menghasilkan SDM unggul bertalenta digital. Mengembangkan dan meningkatkan pendidikan vokasi melalui politeknik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM di Kementerian dan Lembaga KL, Lembaga Non Government Organization (NGO), dan industri terkait.

Poltek Digital Yogya memiliki ruang lingkup pendidikan mencakup bidang digital baik kaum profesional maupun pemimpinya. Ini sejalan dengan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 di mana salah satu pilarnya adalah Pengembangan Masyarakat Digital yang merupakan salah satu fungsi Poltek Digital Yogya.

Berdasar tuntutan dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia yang mampu mengawal program akselerasi transformasi digital menyongsong Indonesia Emas 2045, maka Program Studi di Poltek Digital Yogya disesuaikan dengan kondisi tersebut. Di antaranya meliputi Program Studi Magister Terapan Transformasi Digital. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Digital, Program Studi Sarjana Terapan Komunikasi dan Media Digital, Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Digital, dan Program Studi D1/D2 Pelayanan Publik Digital. Masing-masing dipisahkan dalam format pendidikan kedinasan dan non kedinasan.

Perubahan bentuk kelembagaan dari STMM 'MMTC' menjadi Poltek Digital Yogya memiliki konsekuensi perlunya penyesuaian atas Organisasi, Tata Kerja dan Statuta yang menjadi pedoman. Benar, bahwa perubahan menjadi sebuah perencanaan, salah satunya akibat perubahan regulasi yang harus dipatuhi. Jika semua berjalan sesuai skema, maka ulang tahun STMM MMTc kali ini merupakan ulang tahun terakhir.

Selamat tinggal MMTc, selamat datang Politeknik Digital Yogya. (**)

Eko Wahyunto, Dosen Manajemen Produksi Siaran STMM MMTc.

Pojok KR

Garuda Nusantara juara ASEAN U-19, taklukkan Thailand.
- **Memotivasi prestasi olahraga nasional.**

Pro Kontra Pansus haji 'memanas'.
- **Mudah-mudahan, jangan ada rivalitas politik.**

Fenomena aak bunuh diri naik 150%.
- **Ini masalah serius harus dicegah.**

Beraksi